

GERAKAN SOSIAL DI KABUPATEN BANDUNG AWAL ABAD KE -20

Nina Herlina

Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Jatinangor Sumedang

E-mail: nina.herlina@unpad.ac.id

ABSTRAK. Pada awal abad ke-20 terjadi beberapa gerakan sosial di Kabupaten Bandung, khususnya di Ciparay, Banjaran, dan Majalaya serta di desa-desa sekitarnya. Gerakan sosial ini ternyata melibatkan Sarekat Islam. Penelitian difokuskan untuk mencari jawaban mengapa terjadi gerakan sosial di daerah pedesaan tersebut. Dengan menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik eksternal dan internal, interpretasi serta historiografi dapat dinarasikan peristiwa-peristiwa gerakan sosial yang terjadi. Dan dengan pendekatan menggunakan teori Perilaku Kolektif dari Neil J. Smelser dapat dijelaskan mengapa dan bagaimana gerakan sosial di Ciparay, Banjaran, dan Majalaya serta di desa-desa sekitarnya dapat terjadi. Menurut Teori Perilaku Kolektif yang berdasarkan *Value added theory*, dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor yang menyebabkan mengapa gerakan sosial sebagai salah satu bentuk perilaku kolektif dapat terjadi.

Kata kunci: gerakan sosial; perilaku kolektif; value added theory; Sarekat Islam; Kabupaten Bandung

SOCIAL MOVEMENTS IN BANDUNG REGENCY IN THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

ABSTRACT. In the early 20th century, several social movements emerged in Bandung Regency, particularly in the rural areas of Ciparay, Banjaran, Majalaya, and nearby villages. These movements were associated with Sarekat Islam. This article seeks to explore why these social movements arose in these villages. By employing a four-step critical historical method—comprising the heuristic process, external and internal criticism, interpretation, and historiography—the study narrates the key events surrounding these movements. Using Neil J. Smelser's theory of Collective Behavior, the research aims to provide insights into why and how these social movements occurred in Ciparay, Banjaran, Majalaya, and the surrounding areas. Furthermore, through the value-added theory, it identifies six factors that contributed to the emergence of these movements as forms of collective behavior.

Keywords: social movement; Collective Behavior; Value Added Theory; Sarekat Islam; Bandung Regency

PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, namun gerakan ini biasanya bersifat arkhais (tidak terorganisasi dengan baik, tidak jelas tujuannya) dan bersifat abortif (mudah dilumpuhkan). Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, di seluruh Jawa terjadi wabah gerakan sosial yang disebabkan oleh terjadinya disintegrasi sosial akibat semakin mendalamnya penjajahan kolonial (Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto; 1993; Abdullah dan Lopian, 2013). Kemudian pada awal abad ke-20 terjadi gerakan sosial di Ciparay dan Majalaya, serta desa-desa sekitarnya. Ternyata gerakan sosial dalam bentuk kerusuhan di tempat-tempat ini melibatkan organisasi pergerakan Sarekat Islam (*Memorie van Overgave van Jhr.L.de Stuers*, 2 Januari 1921). Sejak tahun 1921, anggota-anggota Sarekat Islam yang berpaham kiri atau komunis membentuk Sarekat Rakyat dan Sarekat Hijau (Herlina, 2023). Menarik untuk diteliti mengapa terjadi gerakan sosial

dalam bentuk kerusuhan seperti demonstrasi pada masa kini terjadi di daerah pedesaan?

Ada beberapa karya terkait gerakan sosial telah dituliskan dalam bentuk buku. Sartono Kartodirdjo menulis tentang gerakan sosial dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia* (1975). Dalam tulisan tersebut disebutkan ciri-ciri gerakan sosial yang bersifat abortif, arkhais, tidak terorganisasi secara jelas. Selanjutnya Pada tahun 1978. Sartono Kartodirdjo menulis buku berjudul *Protest Movement in Rural Java.*, yang diterbitkan di Kuala Lumpur oleh Oxford University Press. Dalam buku ini dijelaskan tentang gerakan protes yang terjadi di pedesaan di Jawa. Pada tahun 1967 Sartono Kartodirdjo juga menulis disertasi yang berjudul *Pemberontakan Petani Banten 1888* (dan dibukukan pada tahun 1984). Dalam karya besarnya ini Sartono menganalisis tentang gerakan sosial yang terjadi di Cilegon, Banten. Salah satu teori yang dipergunakan untuk menganalisis kasus ini adalah teori Perilaku Kolektif dari Neil J. Smelser. Kasus yang terjadi di Ciparay dan Majalaya serta desa-desa sekitarnya belum dianalisis secara mendalam. Oleh karena itulah, penulis melakukan penelitian

ini. Masalah yang akan diteliti adalah mengapa terjadi gerakan sosial di lokasi-lokasi itu yang melibatkan Sarekat Islam.

Untuk mendapatkan eksplanasi atas permasalahan tersebut penulis meminjam teori dari Ilmu Sosiologi (Lloyd, 1986). Teori yang dipinjam adalah teori Perilaku Kolektif dari Neil J. Smelser. Dalam bukunya yang berjudul *The Collective Behaviour*. (1962), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku kolektif adalah gerakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dasar pemikiran Smelser adalah *Value Added Theory*, yang menegaskan bahwa ada tahapan perkembangan suatu gerakan, yang terus berjalan tanpa pernah bisa kembali ke keadaan sebelumnya, ibarat cairan logam, terus diproses hingga menjadi badan mobil dan bila sudah menjadi badan mobil tidak bisa dikembalikan ke tahapan proses sebelumnya. Jadi menurut Smelser, suatu perilaku kolektif bisa terjadi setelah melalui tahapan sebagai berikut: a. *Structural conduciveness* (Kekondusifan struktural), b. *Structural Strain* (Ketegangan struktural), c. *Generalized belief*, (kepercayaan yang disebarkan) d. *Trigger* (pemicu) e. *Mobilization for action* (mobilisasi untuk aksi), f. *Social Control* (Pengawasan sosial).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1946; Gottschalk, 1985). Tahap pertama, heuristik yaitu menelusuri dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Untuk memperoleh sumber yang otentik, dilakukan kritik eksternal sedangkan untuk memperoleh sumber yang kredibel, dilakukan kritik internal. Untuk memperoleh fakta sejarah, data yang sudah melalui tahap kritik, dikoroborasi dengan sumber pembanding yang tidak saling berkaitan. Fakta tersebut kemudian diinterpretasi, baik secara analisis maupun sintesis. Rangkaian fakta yang telah diinterpretasi secara logis, kemudian direkonstruksi menjadi historiografi tentang Gerakan Sosial di Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi tentang gerakan sosial yang terjadi di Ciparay dan Majalaya serta desa-desa sekitarnya penulis analisis menggunakan Teori Perilaku Kolektif dari Neil J. Smelser. Seperti

telah disebutkan di atas, gerakan sosial terjadi karena adanya enam faktor yang terjadi secara berurutan.

1. Kekondusifan Struktural.

Pada pergantian abad ke-19 menuju abad ke -20 terjadi perubahan sosial karena adanya kesadaran nasional di kalangan masyarakat yang sudah berpendidikan Barat. Dapat dijelaskan bahwa sebelum diperkenalkannya pendidikan Barat, masyarakat hanya mendapat pendidikan di pesantren yang ada di lokasi mereka sejak Islam masuk. Setelah diperkenalkan pendidikan Barat sejak pertengahan abad ke-19, dengan didirikannya *Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) pada tahun 1879 (dan tahun 1914 menjadi MOSVIA). maka masyarakat pribumi secara berangsur-angsur dapat memperoleh pendidikan Barat. Mula-mula sekolah-sekolah hanya didirikan di ibukota kabupaten, itupun hanya untuk golongan menak (bangsawan). Namun sejalan dengan dicanangkannya Politik Etis tahun 1901, pendidikan pun diperluas (Van Niel, 1984). *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), yaitu Sekolah Dasar untuk bumiputera yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda, sudah dibuka sejak tahun 1914 sebagai kelanjutan dari Sekolah Dasar Kelas Satu (*Eerste School*). Sekolah ini diperuntukkan bukan hanya untuk golongan atas namun juga untuk golongan rendah. Selain sekolah yang dibuka pemerintah kolonial, ada pula yang dibuka oleh swasta misalnya Paguyuban Pasundan. Salah satu HIS Pasundan dibuka pula di Ciparay. Selain itu, sejak tahun 1907 dibuka pula Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat (*Volksschool*) di berbagai tempat hingga kecamatan-kecamatan. Selanjutnya tahun 1914 dibuka pula *Vervolgschool* yaitu sekolah lanjutan untuk lulusan *Volksschool* (Brugmans, 1938). Di daerah perkebunan Malabar Bosscha telah dibuka *Volksschool* kemudian *Vervolgschool*. Di Ciwidey juga terdapat sekolah ini. Selain itu, Douwes Dekker, juga membuka sekolah Ksatrian (ksatrian Institut di daerah Ciwidey (Ekadjati, 1986). Bekas gedungnya kini dipakai menjadi Sekolah Dasar Negeri. Selain itu, ada juga Sekolah Cina (kini dipakai sebagai bangunan SD) dan Sekolah gadis. Sekolah Cina memang diperlukan karena cukup banyak orang Cina di Ciwidey. Orang Cina tertua di sana dikenal sebagai Babah Seng Kun pemilik toko besar dan bioskop di Ciwidey.

Munculnya masyarakat yang mendapat pendidikan Barat seiring dengan munculnya organisasi pergerakan. Salah satu organisasi pergerakan yang banyak peminatnya dari

kalangan rakyat jelata adalah Sarekat Islam. Persyaratan yang mudah menjadi anggota dan juga orientasi organisasi yang membela rakyat kecil, menyebabkan jumlah anggota ini membengkak dengan cepat. Dalam beberapa tahun saja sudah mencapai sekitar dua juta orang (Korver, 1985). Di daerah-daerah muncul Sarekat Islam Lokal. Oleh karena besarnya jumlah anggota, kegiatan pun menjadi tidak terkendalikan. (*Memorie van Overgave van Jhr.L.de Stuers*, 2 Januari 1921, *Sarekat Islam Lokal*. 1975; Korver, 1985; vide: Noer, 1990).

Pada tahun 1921, terjadi perpecahan dalam Sarekat Islam. Golongan yang berpaham kiri mendirikan Sarekat Hijau dan Sarekat Rakyat. Mereka membentuk Perkumpulan Pamitran yang berpusat di Distrik Banjaran, Kabupaten Bandung. Pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Asmita. Dalam pembentukan perkumpulan Pamitran itu Wedana Banjaran memainkan peranan yang besar dan mendapat perintah Bupati Bandung. Pada mulanya Pamitran melakukan kegiatan dalam bidang kesenian dengan tujuan meningkatkan hubungan antara rakyat dengan pejabat pemerintah, antara penduduk kota dan desa. Untuk mencapai hubungan yang erat antara penduduk desa dan kota, Pamitran membentuk perkumpulan sandiwara yang diberi nama Perkumpulan Sandiwara Bandung. Perkumpulan ini pernah mentas dalam beberapa kesempatan, di antaranya: pada waktu di Kota Bandung diselenggarakan Kongres Java Institut, mereka menyumbangkan pementasan “Lutung Kasarung”. (Herlina, 2023)

Pada awal tahun 1925 Perkumpulan Sandiwara Bandung mengalami perubahan berhubung dengan masuknya Lurah Desa Banjaran dan beberapa orang pedagang pasar Banjaran sebagai anggota. Mulai saat itu timbul kegiatan baru dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di antara para anggotanya. Perubahan tersebut terjadi karena keadaan di Bandung mulai panas dengan berdirinya Sarekat Rakyat. Memanasnya situasi di Banjaran dimulai sejak Partai Komunis Indonesia bersama Sarekat Rakyat melancarkan kegiatan propaganda dengan menuntut penghapusan pajak tanah dan rencana pembagian tanah dari para tuan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah atau penggarap dan buruh tani (Herlina, 2023). Kondisi masyarakat seperti ini sangat kondusif untuk terjadinya gerakan sosial.

2. Ketegangan Struktural.

Situasi yang sudah kondusif untuk terjadinya gerakan sosial ditambah lagi berbagai

peristiwa yang semakin meruncing menjadi ketegangan struktural. Di Majalaya Sarekat Islam didirikan pada bulan April 1913 dan mendapat pengesahan dari pemerintahan kolonial pada tanggal 17 Februari 1915, No. 24. Pertumbuhan jumlah anggota melonjak dengan cepat. Pada bulan Januari – September 1918 anggota Sarekat Islam sudah mencapai 3251 orang dan pada akhir bulan Mei 1918 telah masuk 341 orang anggota wanita. Pada bulan Juni 1918 H.O.S. Cokroaminoto, Presiden Sarekat Islam Pusat berkunjung ke daerah ini untuk mengurus soal iuran anggota yang belum masuk ke pusat. Masyarakat yang mengalami tekanan penjajah, dengan berbagai pajak yang harus ditanggung, atau yang merasa diperlakukan tidak adil dengan tidak dibayarnya upah kerja, merasa mendapat harapan untuk lepas dari tekanan penjajah dengan datangnya pimpinan Sarekat Islam.

Pengurus Sarekat Islam Majalaya, Mas Suriadimaja Darmakusuma seorang mantri guru mampu membangkitkan semangat juang pengikutnya. Pada masa itu guru bumi putera dan guru-guru pada umumnya mempunyai perasaan iri terhadap pegawai pamongpraja demikian pula sebaliknya. Pada tahun 1918 terdapat sembilan kepala desa di Kecamatan Majalaya yang menjadi pengurus Sarekat Islam. Hal ini mengakibatkan jumlah anggota naik. Pada bulan Juni 1918 Wedana Ciparay dipecat dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menangani keamanan dan ketertiban akibat gerakan Sarekat Islam (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023)

Sementara itu, di Banjaran, bentrokan antara Sarekat Rakyat dengan Pamitran tak dapat dihindari lagi. Anggota-anggota Perkumpulan Pamitran mendapat dukungan dan bantuan polisi setempat dalam persaingan dan pertengkaran dengan Sarekat Rakyat dan PKI. Sarekat Rakyat dengan giat mengadakan rapat-rapat untuk mengadakan propaganda penghapusan pajak dan pembagian tanah. Mereka mengajak para petani untuk bersama-sama melawan pemerintah kolonial (Herlina, 2023)

Jelas bahwa kondisi masyarakat di Ciparay dan Majalaya pada tahun 1918 dan di Banjaran tahun 1925, semakin meningkatkan ketegangan struktural.

3. Kepercayaan yang disebarkan

Kepala Desa Cibodas adalah pemimpin suatu aliran kepercayaan rahasia yang menyebarkan kepercayaan bahwa Tuhan telah menitis pada diri Cokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam, yang turun ke bumi untuk memerintah. Pada tanggal 16 Juli 1918 tua kampung mengumpulkan penduduk milisi Sarekat Islam karena

menurut mereka Ratu Wihelmina tidak lama lagi akan diganti oleh Cokroaminoto. Pemberitaan ini menjadi pendorong meningkatnya jumlah anggota baru Sarekat Islam di Kewedanaan Banjaran. Pembicaraan sehari-hari penduduk pada waktu itu adalah tentang Kerajaan Cokroaminoto. Tampaknya nama “Cokro” dikait-kaitkan dengan Ratu Adil, yang biasanya memakai nama “Cokro” (Kartodirdjo, 1984; Korver, 1985).

Berita ini makin hari makin meluas di kalangan masyarakat dan menimbulkan keresahan. Tambahan pula muncul berita tentang akan terjadinya pemberontakan pada tahun 1919. Berita tersebut membuat penduduk makin resah dan gelisah. Pada tanggal 13 September 1918 Mas Suriadimaja Darmakusuma, Mantri Guru di Cangkring dan Tokoh Sarekat Islam ditahan di Bandung. Atas permintaan Direktur Pendidikan ia dipindahkan tugas mengajarnya ke Cianjur Selatan (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023)

Ada juga kepercayaan lain yang dihembus-hembuskan. Dari laporan Asisten Residen Bandung Hillen kepada Residen Priangan pada tanggal 21 September 1918 dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 1918 telah terjadi keributan di Desa Rancakasumba, Majalaya, Bandung. Sekelom-pok masyarakat yang terdiri dari sekitar 180 orang anggota Sarekat Islam menyergap Haji Jaelani, penduduk Desa Rancakasumba. Mereka mendesak Haji Jaelani supaya masuk Sarikat Islam. Haji Pakih, kepala kelompok Sarekat Islam, menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi yang tidak takut kepada pistol dan orang Belanda. Ia menyatakan pula bahwa barangsiapa tidak masuk Sarikat Islam akan mendapat pelajaran yang setimpal (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023)

4. Pemicu atau Trigger

Haji Jaelani telah berjanji akan masuk Sarekat Islam, tetapi hingga bulan berikutnya ia tidak memenuhi janjinya bahkan dia menghilang. Pada tanggal 9 September 1918 dia berhasil ditangkap ramai-ramai di rumahnya. Haji Pakih dan Maja kemudian ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan masing-masing 1,5 bulan penjara. Dua orang pengurus desa dipecat karena turut campur dalam peristiwa di Rancakasumba itu (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023).

Di Ciparay timbul pula gerakan menentang pemerintahan setempat. Untuk menghadapi gerakan itu, Asisten Residen mengirim 8 orang polisi yang dipimpin oleh Kepala Agen Polisi untuk berjaga-jaga di tempat itu. Pada tanggal 12

dan 13 September 1918 diberitakan bahwa di desa-desa di Kewedanaan Ciparay telah timbul kerusuhan yang dilakukan oleh anggota-anggota Sarekat Islam terhadap penduduk setempat. Gerakan Sarekat Islam Majalaya itu dipimpin oleh Mantri Guru di Cangkring yang dikenal sebagai Mas Suriadimaja dan Kepala Desa Cibodas. Kedua orang itu dianggap sebagai pusat gerakan. Karena itu mereka dikenakan tahanan oleh Polisi pada tanggal 13 September 1918 (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023)

Pada tanggal 14 September 1918 Asisten Residen, Bupati, Patih dan Kontrolleur dari Bandung mengadakan pemeriksaan di desa-desa di Kewedanaan Ciparay. Pemeriksaan tersebut dimulai dari Desa Cibodas yang kepala desanya terlibat gerakan tersebut. Kepada penduduk diberitahukan bahwa Kepala Desa mereka ditahan di Bandung bersama beberapa orang anggota pengurus Sarekat Islam. Penduduk berkumpul dan menanyakan duduk persoalannya, terutama persoalan anggota-anggota Sarekat Islam. Dari penduduk yang bukan anggota Sarekat Islam diperoleh keterangan bahwa (Kepala Desa) Cibodas telah menentang kekuasaan pemerintah untuk kepentingan Imam Mahdi. Lurah Cibodas pernah menginformasikan kepada penduduk bahwa Gubernemen sudah cukup lama mencelakakan penduduk di Hindia Belanda dan sekarang bagian bumi putera telah sampai pada waktunya (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023)

Dalam keributan yang terjadi Haji Hasan Ibrahim dipukul oleh Lurah Cibodas karena tidak mau masuk Sarekat Islam. Akibatnya ia lari ke Leles, Garut, karena takut dianiaya lagi oleh anggota Sarekat Islam. Lurah Bojong pun dianiaya oleh Lurah Cibodas. Selain itu, rumah-rumah penduduk Desa Bojong yang bukan anggota Sarekat Islam dilempari batu. Penduduk yang rumahnya kena lemparan batu mengadu kepada Kepala Desa (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023).’

Pada bulan Februari 1925 pertentangan antara anggota Sarekat Rakyat dengan anggota Pamitran pecah gara-gara insiden ronda malam. Sebagai tindakan berjaga-jaga Lurah Banjaran mengharuskan kepada setiap anggota Sarekat Rakyat untuk mendaftarkan diri di desa, demikian pula untuk anggota perkumpulan Pamitran untuk penugasan ronda malam. Namun anggota dan pengurus Sarekat Rakyat menolak untuk memberitahukan dan mendaftarkan diri kepada lurah dan polisi di desa. Sebuah rumah milik anggota Pamitran telah dilempari anggota Sarekat Rakyat. Pada malam harinya dilakukan serangan balasan: para anggota Pamitran mele-

pari rumah seorang anggota Sarekat Rakyat. Dalam keadaan seperti itu penduduk petani yang tidak menjadi anggota Pamitran ataupun Sarekat Rakyat merasa takut dan gelisah karena oleh kedua belah pihak dijadikan sasaran tuduhan dan ajakan kedua perkumpulan itu yang kadang-kadang dilakukan secara paksa (Herlina, 2023).

Rumah seorang anggota Sarekat Rakyat di Ciwidey dihancurkan oleh para anggota Pamitran bersama Sarekat Hijau pada malam hari. Keesokan harinya ia dikunjungi Asisten Wedana yang menanyakan mengapa tidak melaporkan kepada polisi bahwa rumahnya telah dirusak. Seorang anggota Sarekat Rakyat menjawab: “Kepada siapa harus melapor, sementara saya tahu sendiri siapa yang telah melakukan hal ini”. Mendengar jawaban ini Asisten Wedana mukanya merah karena marah dan pergi ke rumah berikutnya. Namun, pada malam harinya rumah itu dihancurkan oleh anggota Sarekat Hijau dan Pamitran. Dari beberapa kejadian orang sudah tahu dengan cepat siapa yang melakukan pelemparan batu itu. Rakyat tidak mau melaporkan peristiwa itu walaupun barang-barang isi rumah telah dicuri orang. Bahkan anggota-anggota Pamitran dan Sarekat Hijau yang telah menghancurkan rumah-rumah anggota Sarekat Rakyat mendapat upah antara 10 sen sampai 20 sen untuk setiap rumah yang dihancurkan. Upah ini didapat dari seorang kepala perkebunan yang diberikan kepada kepala pemerintah setempat untuk upah aksi penghancuran rumah-rumah anggota Sarekat Rakyat (Herlina, 2023).

Di daerah Ciparay terjadi pula pertengkaran mulut saling menuduh yang meningkat menjadi saling melempar dengan batu di antara anggota-anggota Sarekat Rakyat dengan Pamitran pada waktu rapat yang berakibat sebanyak 17 rumah rakyat hancur. Kejadian ini jarang dilaporkan kepada polisi atau pemerintah setempat karena rakyat takut mendapat pembalasan dari kedua belah pihak. Perusakan tanam-tanaman, pencurian barang, dan pelemparan rumah terjadi setelah kejadian perkelahian antara anggota Sarekat Hijau dengan anggota Sarekat Rakyat di Sumedang, yang menjalar tidak hanya di daerah Bandung tapi juga ke Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut (Herlina, 2023).

5. Mobilisasi untuk Aksi

Di Majalaya anggota-anggota Sarekat Islam mengadakan pawai ke desa-desa sekitar. Orang-orang banyak keluar rumah untuk melihat barisan yang panjang itu seperti di Desa Mantri Cina, Talun, dan Balekambang. Arak-arakan

Sarekat Islam dilakukan tanpa izin atau tanpa memberitahu kepada lurah atau camat setempat. Pengikut barisan ini membawa batu, pasir, alat musik, dan bendera sambil berteriak-teriak. Bendera-bendera yang dibawa mereka berwarna hijau, putih, dan merah (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023). Inilah bentuk demonstrasi salah satu yang paling awal yang terjadi di Nusantara.

Dari Desa Maruyung diketahui bahwa seorang lebe (pejabat desa bidang agama) diambil dari rumahnya oleh 40 orang anggota Sarekat Islam. Di Desa Talun anggota Sarekat Islam memukuli dua orang penduduk setempat dengan sepengetahuan tua kampung, polisi desa, jurutulis, dan Lurah Talun. Di Desa Cibeet juga terjadi pelemparan batu. Dari penduduk setempat didapatkan formulir Sarekat Islam yang berisi anjuran supaya menolak pemerintahan negara yang menyusahkan penduduk (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023).

6. Pengawasan Sosial

Bila pengawasan sosial berhasil dilakukan oleh pihak berwenang waktu terjadinya gerakan sosial, maka gerakan sosial bisa dihentikan. Pada bulan Oktober 1918 Pemerintah Kolonial di Priangan mengirim kesatuan polisi dan militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Ciparay dan Majalaya. Demikian pula Lurah Desa Cicadas Wiratmaja dihukum penjara karena telah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah maksimal 6 tahun. Murtasik, Ketua Kampung Pasir Huni, Desa Cibeet ditahan karena menghasut rakyat dengan menyebarkan berita bahwa pada tahun 1920 Ratu Wihelmina akan turun takhta dan Cokroaminoto akan menjadi raja Jawa (*Sarekat Islam Lokal*. 1975; Herlina, 2023).

Pejabat pemerintah setempat sulit untuk mendapatkan keterangan mengenai bagaimana pelemparan dengan batu atas rumah-rumah atau perusakan kebun-kebun petani dan pencurian barang-barang itu terjadi. Jalan satu-satunya ialah dengan mengadakan penjagaan setiap malam oleh polisi dan pejabat setempat mulai dari wedana, camat, lurah, dan penduduk. Sehubungan dengan situasi tersebut di atas di Bandung didirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama “Anti Ribut Bond” yang anggotanya justru bekas anggota-anggota Sarekat Rakyat. Pada minggu-minggu pertama setelah pendirian perkumpulan ini anggota-anggotanya secara bergilir melakukan penjagaan pada waktu malam. Menurut keterangan anggotanya, anggota perkumpulan Anti Ribut Bond terdiri dari berbagai suku bangsa warga Kota Bandung.

Jumlahnya mencapai sekitar 1500 orang. Beberapa bulan setelah keadaan menjadi tertib kembali perkumpulan Anti Ribut Bond membubarkan diri (Herlina, 2023).

Timbulnya gerakan sosial di Kabupaten Bandung ini ternyata berdampak kepada pemerintah kabupaten. Perlawanan Sarekat Islam di Ciparay dianggap pemerintah kolonial tidak lepas dari pada kesalahan dan kelemahan Bupati Bandung R.A.A.Martanagara yang sudah lanjut usia itu (lahir 1845) yang tidak memungkinkannya untuk cepat tanggap dalam mengatasi gerakan sosial yang terjadi di daerahnya. Akhirnya R.A.A. Martanagara diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Bandung pada tahun 1918. Setelah pensiun dengan *besluit* tanggal 14 Oktober 1918, ia kembali ke Sumedang dan menetap di Burujul, sehingga dikenal sebagai Kangjeng Dalem Burujul. Bupati ini memang sejak awal menjadi Bupati tahun 1893 sudah menimbulkan konflik karena ia keturunan Bupati Sumedang yang ditunjuk pemerintah kolonial menjadi Bupati Bandung. Akibatnya terjadi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh menak Bandung. Hal ini menyebabkan menak Bandung tersebut dibuang ke Ternate. Kejadian ini menimbulkan luka sosial di kalangan menak Bandung dan baru sembuh sesudah RAA Martanagara dipensiunkan (*Memorie van den Resident der Preanger Regentschappen*, 4 Mei 1893, no 34. *Geslachtlijst van Raden Aria Martanagara*, 1893, *Conduitestaat van R.A.A. Martanagara Regent van Bandoeng over het jaar 1910-1918*, *Dienstaat van Raden Aria Martanagara, Patih van Afdeeling Soekapoera kolot* .1893.vide: Martanagara, 1923, Lubis, 2000).

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, data yang ada dianalisis dengan Teori Perilaku Kolektif dari Neil J Smelser, dapat dijelaskan mengapa terjadi gerakan sosial di Kabupaten Bandung, khususnya Ciparay, Banjaran, dan Majalaya serta desa-desa sekitarnya, juga di Kota Bandung. Dimulai dengan kekondusifan struktural sesudah terjadinya perubahan sosial akibat pengaruh pendidikan Barat, munculnya kaum intelektual yang diikuti dengan munculnya pergerakan nasional dalam bentuk organisasi Sarekat Islam. Ketegangan struktural yang sulit dikendalikan dengan membengkaknya jumlah anggota Sarekat Islam di pedesaan tersebut diikuti pula dengan dihembuskannya kepercayaan bahwa Ratu Adil,

yang menitis kepada Cokroaminoto, Presiden Sarekat Islam, sudah datang untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Juga disebarkan kepercayaan bahwa Imam Mahdi sang juru selamat sudah datang dan disebarkan pula desas-desus bahwa Ratu Wilhelmina akan diganti oleh Ratu Adil. Pemicu gerakan timbul ketika dua mantri guru dan kepala desa, aktifis Sarekat Islam ditahan dan dipenjarakan. Pimpinan Sarekat Islam lainnya memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi, melempari dengan batu rumah mereka yang tidak mau masuk Sarekat Islam juga memukuli orang-orang yang tidak mau menjadi anggota Sarekat Islam. Sesudah pengawasan sosial berjalan dengan mengirim polisi dan militer ke lokasi, gerakan sosial pun berhenti. Ternyata gerakan sosial ini memakan korban berupa pemberhentian Bupati Bandung dari jabatannya. Hal ini merupakan kelanjutan pengawasan sosial. Untuk kasus Sarekat Rakyat dan Sarekat Hijau, pengawasan dilakukan dengan membuat perkumpulan Anti Ribut Bond dan gerakan sosial yang terjadi pun berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip /Sumber Primer

- Collectie van R.A. Kern. Algemene Rijksarchief. Tweede Afdeeling*. ANRI
- Conduitestaat van R.A.A. Martanagara Regent van Bandoeng over het jaar 1910-1918*. ANRI
- Dienstaat van Raden Aria Martanagara, Patih van Afdeeling Soekapoera kolot*. (1893)., ANRI
- Gedenkboek MOSVIA 1879-1929*. (1929). Bandoeng: Mijvorkink
- Geslachtlijst van Raden Aria Martanagara*, (1893), ANRI.
- Memorie van Overgave van Jhr.L.de Stuers*, 2 Januari 1921. ARA
- Missives van den Resident der Preanger Regentschappen*, 4 Mei 1893, no 34. Zeer Geheim. ANRI.
- Missives van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur* 7 Juni 1893, no 3218, Geheim, ANRI.
- Missives van den Adviseur Honorair voor Inlandsche Zaken* 10 Juni 1893. No 116. ANRI
- Missives van den Raad van Nederlandsch Indie* 16 Juni 1893, ANRI.

“Sarekat Islam Lokal” *Penerbitan Sumber-sumber Sejarah no 7.* (1975). Jakarta: ANRI

Soerat dari R.A.A. Martanagara Regent van Bandoeng untuk R.A. Kern, Collectie Kern, H 797, inv no 44, KITLV

Martanagara, R.A.A. (1923). *Babad Raden Adipati Aria Martanagara.* Bandoeng: Aurora.

Volksalmanak Soenda, (1919). Bandung: Kolff.

Buku

Abdullah, Taufik dan Lapian, A.B. (ed). (2013). *Indonesia Dalam Arus Sejarah. Jilid 5.* Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.

Brugmans. I.J. (1938). *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlands Indie.* Groningen, Batavia: J.B. Wolters.

Day, Clive. (1904). *The Policy and Administration of the Dutch In Java.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Ekadjati, Edi S. (1986). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Garraghan, Gilbert J. S.J..1946. *A Guides tyo Historical Method.* Fordham University Press.

Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah.* (Terj.). Jakarta: UI Press.

Kartodirdjo, Sartono. (1978). *Protest Movement in Rural Java.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.

----- (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888.* Jakarta: Pustaka Jaya.

----- (1984). *Ratu Adil.* Jakarta: Sinar Harapan.

Korver, A.P.E. (1985). *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafitipers.

Lloyd , Christopher. (1986). *Explanation on Social History.* New York: Basil Blackwell Inc.

Lubis, Nina H. (2000). *Konflik Elite Birokrasi; Biografi Politik R.A.A. Martanagara.* Bandung.

Herlina, Nina. (2023). *Sejarah Kabupaten Bandung.*

Noer, Deliar. (1990). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.* Jakarta: LP3-ES.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia.* Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka.

Pringgodigdo, A.K. 1970/1986. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia.* Jakarta: Dian Rakjat.

Rutgers, S.J. (1951). *Sedjarah Pergerakan Indonesia.* Surabaya: Hajam Wuruk.

Smelser, Neil J. (1962). *Theory of Collective Behavior.* New York: Free Press

Soeminto, Aqib. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda.* Jakarta; LP3ES

Tirtoprodjo, Susanto. (1986). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia.* Jakarta: Pembangunan.

Tim Penyusun Sejarah Kabupaten Bandung, (1974). *Sejarah Kabupaten Bandung.*

Van Niel, Robert. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia (terj.)* Jakarta: Pustaka Jaya.